

## JEMAAH HAJI BIYAI RAPAT DPR



[www.zain.madressa.net](http://www.zain.madressa.net)

Pekan lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan laporan adanya pungutan sebesar Rp 6.000 dari 205.000 anggota jemaah haji tahun 2006, dan kemudian melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pungutan ini diduga digunakan membiayai rapat dengan panitia kerja di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut salinan dokumen yang dimiliki *Tempo*, biaya yang dianggarkan rapat itu mencapai Rp 1,23 miliar.

Dana itu, menurut salinan surat pejabat Departemen Agama, digunakan untuk rapat panitia kerja yang dibentuk Komisi VIII DPR, guna membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2006. Rapat itu berlangsung belasan kali pada tanggal 31 Mei hingga tanggal 13 Juni Tahun 2005. Selain rapat di gedung DPR, pembahasan dilakukan di hotel di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Setiap kali rapat, anggota Dewan mendapat uang transpor Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap laporan ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar telah menegaskan akan melakukan pengusutan secara tuntas dugaan pembiayaan rapat Departemen Agama dengan panitia kerja Dewan Perwakilan Rakyat.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, sejumlah anggota Komisi VIII mengaku tidak terlibat atau lupa apakah ikut dalam panitia kerja atau tidak pada saat itu. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Jhonny Allen Marbun menyatakan bahwa setiap rapat dengan mitra kerja, termasuk Departemen Agama, telah memiliki alokasi anggaran tersendiri dan tak ada anggaran dari mitra kerja atau pihak lain dan kebijakan seperti itu sudah ada sejak awal DPR periode 1999-2004. Jika terbukti ada anggaran eksekutif yang masuk untuk membiayai rapat legislative, maka dapat dikatakan telah terjadi penyimpangan.

Direktur Pengelola Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Departemen Agama Abdul Ghafur Djawahir, menyatakan akan melakukan pengecekan mengenai benar atau tidaknya terdapat pungutan bagi jemaah haji untuk membiayai dana pembahasan BPIH dengan DPR. Selain soal biaya rapat, ICW mempersoalkan biaya perjalanan dinas dua anggota Komisi VIII, Zulkarnain Djabar dan Said Abdullah, mereka diduga menerima gratifikasi karena mendapatkan biaya US\$ 2.845 untuk memantau penyelenggaraan haji pada 2006.

Menanggapi hal ini, Direktur Pengelola Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Departemen Agama mengakui pihaknya berinisiatif memberikan uang perjalanan dinas kepada mereka karena DPR belum memiliki anggaran untuk pengawasan haji.

Kedua anggota Komisi VIII yang diduga menerima gratifikasi mengaku apabila dianggap bersalah, ia siap mengembalikan uang tersebut, mereka juga mengaku telah melapor ke fraksi terkait masalah ini.

**Sumber Informasi :**

1. Koran Tempo;
2. Tribun Jabar.